



AKIBAT PERCERAIAN DISEBABKAN  
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
Studi Kasus  
Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk  
Di Pengadilan Agama Demak

RINGKASAN TESIS

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :  
Siti Nur Azizah  
B4B 008 256

PEMBIMBING :  
Hj. Dewi Hendrawati,SH. MH.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan “ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Adanya perceraian membawa akibat terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi.

Penulis tertarik melakukan studi kasus Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak, dengan penggugat SITI NUR KASANA dan tergugat JAMARI. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut alasan/dalil-dalil yang mengakibatkan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan kalau terjadi pertengkaran tergugat menyakiti penggugat dengan pecahan kaca sampai tangan penggugat terluka dan berdarah.

Kasus tersebut merupakan salah satu dari 1396 kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2008, yang sebagian besar adalah gugatan perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Khususnya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahan yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini mengenai akibat hukum perceraian karena tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat dari penelitian yang dapat diambil , yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu dapat menambah khasanah dan sumbangan pikiran kepada lembaga terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai perceraian dalam perkawinan yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga.

### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Kerangka Konsep

Dari kerangka konsep ini , penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini. Dalam Hal ini, akibat perceraian disebabkan tindak Kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Kerangka Teori

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang menyatukan antar laki-laki dan wanita untuk mendapatkan keturunan yang baik dan hubungan yang halal dan sah. Hal tersebut dipandang demikian, sebab dari segi bahasa, perkawinan memiliki arti “berkumpul, campur, berhubungan badan (jimak) dan bersatu yaitu dua orang yang menjadi satu”.<sup>1</sup>

### b. Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah dan mengharapkan Ridhonya dan Sunnah Rasul, demi

---

<sup>1</sup> M.Ma'arif. *problematika wanita modern*, (Surabaya: Karya Gemilang Utama), Hal 77

memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.<sup>2</sup>

#### c. Syarat-syarat Perkawinan

Yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas.<sup>3</sup>

#### d. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya.

#### e. Alasan Perceraian

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>2</sup> Abdul Muhaimin As'ad.Opcit.hal 4

<sup>3</sup> Abdul Muhaimin As'ad.Ibid.hal 35.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

f. Akibat Perceraian

Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan Yuridis empiris.
2. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis
3. Sumber dan Jenis Data
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, serta data sekunder yang merupakan data pendukung keterangan atau penunjang kelengkapan data primer.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, dari hasil penelitian baik studi di lapangan maupun studi dokumen , pada dasarnya merupakan data yang telah penulis kumpulkan baik dari data primer dan data sekunder.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

##### **2. Dasar-Dasar Perkawinan**

###### **a. Tujuan Perkawinan**

Menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan tersebut jelas bahwa arti perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>4</sup> Kompilasi hukum Islam, *Op. Cit*, Pasal 2 jo. Pasal 3.

seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan tujuannya adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

#### **b. Syarat-Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut Hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan di dalam Pasal-Pasalnya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

#### **c. Asas-asas Perkawinan**

Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada, 2004), edisi keenam cet XI, hal.139-141.

Yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **d. Akibat Perkawinan**

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- 2) Timbulnya hubungan antara suami isteri;
- 3) Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

#### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>6</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>6</sup> Zainnudin Ali, *Loc.Cit*

## 2. Alasan Perceraian

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq”.

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :<sup>7</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah bperkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19),Kompilasi Hukum Islam(Pasal 116), Wacana Intelektual,2007), hal. 205

dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

### **3. Akibat Perceraian**

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , didalam Pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan

atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>8</sup>

bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Kekerasan Fisik (Pasal 6),
- b. Kekerasan Psikis (Pasal 7),
- c. Kekerasan Seksual (Pasal 8);
- d. Penelantaran Keluarga (Pasal 9 Ayat 1).

Bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak terhadap isteri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*(t.t : Lima Bintang , t.th), hal. 3.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan alasan untuk mengajukan Perceraian**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, serta hasil wawancara dengan Penggugat maupun Hakim Pengadilan Agama Demak, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam kasus adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena yang menjadi penyebab penggugat mengajukan gugat cerai adalah seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, dan juga setiap terjadi pertengkaran tergugat menyakiti jasmani penggugat, pernah juga tergugat menempeleng wajah penggugat hingga memar dan juga pernah menyakiti tangan penggugat dengan pecahan kaca sehingga tangan penggugat terluka.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan tersebut, jelas bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam putusan Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, Hakim tidak menyebutkan satu Pasalpun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan.

Meskipun dalam putusan tersebut yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.<sup>11</sup> Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

---

<sup>10</sup> Noor Kholil, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Demak*, (Demak: 4 Februari 2010)

<sup>11</sup> *Ibid.*



Landasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memeriksa dan membuat putusan, yaitu :

- a. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat secara sah terikat dalam perkawinan.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- c. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawadah warahmah) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- d. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

- e. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dilakukan tergugat terhadap penggugat.
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

**B. Akibat Perceraian disebabkan oleh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Demak**

Akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
3. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

---

<sup>12</sup> Idris Ramulyo. Op. Cit.hal 152

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Subyek, akibat perceraian adalah sebagai berikut :

1. Terhadap suami isteri,

Hubungan perkawinan subyek dan mantan suaminya menjadi terputusnya karena Putusan Pengadilan Agama.

2. Terhadap Anak,

- . Karena anak belum mumayyiz, maka hak pemeliharaan anak diserahkan kepada subyek, Mantan suami diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) perbulan, dan menanggung semua biaya pendidikan anaknya sampai anak mereka dewasa.

3. Terhadap Harta Bersama

Dalam perkawinan subyek dengan mantan suaminya harta gono gini/harta bersama adalah berupa rumah tempat tinggal mereka dan tambak ikan yang semuanya terletak di desa Surodadi Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Adapun pembagiannya tidak berdasarkan seperdua bagian masing-masing, akan tetapi disepakati oleh kedua belah pihak dan pihak keluarga sebagai berikut :

- a. Rumah beserta perabotannya diserahkan kepada Subyek;
- b. Tambak ikan di serahkan kepada mantan suaminya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dijadikan alasan perceraian karena secara substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam memutuskan perceraian dalam Gugatan Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA. Dmk.
2. Akibat perceraian adalah :
  - a. Putusnya hubungan Suami Isteri akibat putusan Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
  - b. Hak Pengasuhan Anak dibawah perwalian ibunya, dan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- c. Pembagian harta gono gini dilakukan pembagian bersama, sedang harta bawaan yang diperoleh masing-masing adalah dibawah penguasaan mereka masing-masing.

## **B. Saran**

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutus permohonan gugatan cerai harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian, mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.
  2. Bagi suami maupun isteri, agar memikirkan masak-masak sebelum memutuskan untuk bercerai, dengan cara mencari solusi yang tepat untuk menghindari perceraian, dengan bersikap bijaksana untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga agar bisa kekal dan abadi.<sup>13</sup>
  3. Perlunya sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim Pengadilan Agama, supaya dapat mengimplementasikan Undang-Undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan baik, dan juga kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan. Selanjutnya sosialisasi kepada kalangan agamawan dan pemuka agama untuk mengubah kultur dan interpretasi agama.
-